

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat mendorong perluasan jaringan informasi dan komunikasi saat ini. Komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak maupun waktu. Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak karena masyarakat menginginkan komunikasi dan penyebaran informasi lebih cepat.

Informasi memiliki peran strategis sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai sumber daya lokal dapat dikemas sebagai sebagai produk informasi yang tepat akan berpotensi menjadi sumber kegiatan ekonomi yang berdaya saing tinggi, contoh: keindahan alam, iklim maupun sumber daya hayati. Produk informasi ini juga akan menjadi *database* yang dapat diakses untuk dimanfaatkan secara optimum. Pemerintah pun mulai memanfaatkan *electronic government* atau *e-Government* yang menjadi tren baru di birokrasi saat ini.

Penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota juga telah mengalami kemajuan sangat pesat. Kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi daerah yang sistematis menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (*knowledge economy*) dan masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge society*). Terlebih sejak terjadinya reformasi yang menjadi titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi periode 2011-2016 telah berakhir di pertengahan tahun 2016. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi terpilih periode 2017-2022 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Adapun penyusunan Renstra mengikutsertakan visi, misi, program, dan kebijakan Bupati Muaro Jambi dalam bidang komunikasi dan informatika selama 5 tahun ke depan yang selanjutnya menjadi performa Diskominfo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 - 2022 digunakan beberapa pendekatan agar dicapai hasil yang maksimal, adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
3. Pendekatan Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
4. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor - faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi nantinya akan digunakan untuk rencana kerja yang lebih rinci yaitu dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit dan jelas. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi ini diharapkan dapat mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi dalam menjalankan fungsi sebagai

fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informasi di Kabupaten Muaro Jambi guna mewujudkan MUARO JAMBI TUNTAS 2018.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

- a. Undang-undang (UU)
  1. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  2. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
  5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah (PP)
  1. PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  2. PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
  3. PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
  4. PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI
  5. PP Nomor 49 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Asing (LPA)
  6. PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
  7. PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)
  8. PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)
  9. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemda
  10. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  11. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan Presiden
  1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI)
  3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- d. Instruksi Presiden (Inpres)
1. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
  2. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
  3. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan *e-Government*
  5. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknologi Informasi
- e. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
1. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo
  2. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika
  3. Peraturan Menkominfo RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
  4. Peraturan Menkominfo RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Strategis Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
  5. Peraturan Menkominfo RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  7. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
  8. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
  9. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

10. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Peraturan daerah dan peraturan gubernur
  1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2021
  2. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi

### **1.3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi adalah untuk memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Muaro Jambi selama lima tahun ke depan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi adalah agar diperoleh arah dan pedoman penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang *e-Government*, bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian tahun 2017 – 2022, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel.

#### **1.3.3 Manfaat**

Dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, manfaat perencanaan strategis, yaitu :

1. Menjadi alat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dan seluruh jajarannya untuk membangun arah dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dalam jangka menengah
2. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui prioritas dan tahapan-tahapan kerja
3. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika pada semua tingkatan
4. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan, agar eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis

5. Menjadi sarana komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengoptimalkan pelayanan publik
6. Mengembangkan strategi yang antisipatif, inovatif dan fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sebagai suatu organisasi
7. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.4. Tahapan Renstra**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi 2017-2022 secara garis besar terdiri atas empat yaitu tahapan persiapan penyusunan Renstra, tahapan penyusunan rancangan Renstra, tahap penyusunan rancangan akhir Renstra dan tahapan penetapan Renstra. Berikut ini adalah rincian dari masing-masing tahapan tersebut:

##### **1. Persiapan Penyusunan Renstra**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut adalah:

##### **a. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pembentukan Tim penyusun Renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

##### **b. Orientasi mengenai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

**c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.

**d. Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

**2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2022 tersebut adalah:

- i. Pengolahan data dan informasi
- ii. Analisis gambaran pelayanan DISKOMINFO
- iii. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra DISKOMINFO
- iv. Penelaahan RTRW
- v. Analisis terhadap dokumen KLHS
- vi. Perumusan isu-isu strategis
- vii. Perumusan visi dan misi DISKOMINFO
- viii. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- ix. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

**3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD**

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

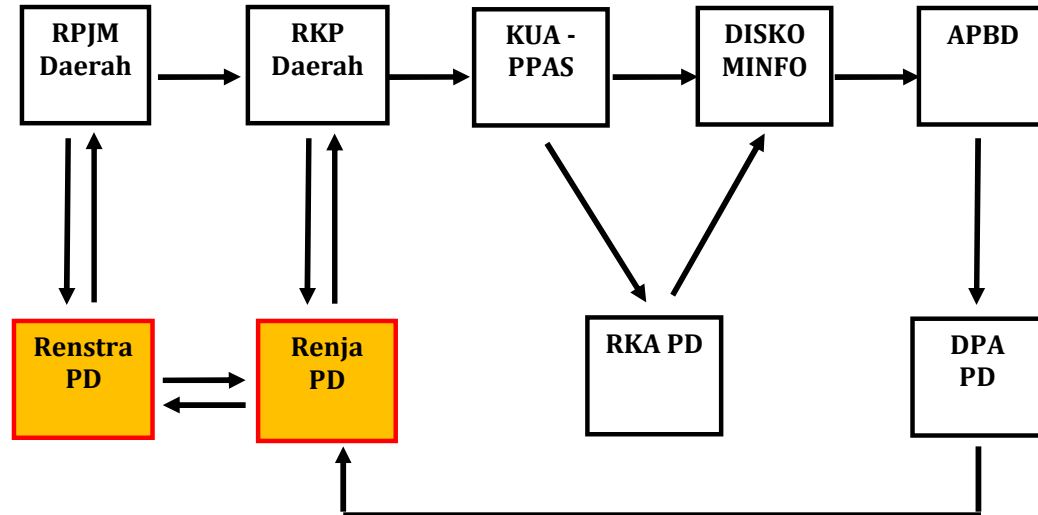


#### 4. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada DISKOMINFO untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan Renstra PD dengan keputusan Kepala Daerah.

Berikut ini keterkaitan antara Renstra DISKOMINFO dengan Renja DISKOMINFO, rencana pembangunan 5 tahunan ini (Renstra) selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian serta reformasi birokrasi nantinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Renstra PD maupun RKPD.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rencana strategis ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Tahapan Renstra
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Permasalahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- 2.5 Potensi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

### **BAB III ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan RPJMD Muaro Jambi 2016-2021
- 3.4 Isu-isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi

### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

- 5.1 Program
- 5.2 Kegiatan Pokok

### **BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARO JAMBI**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk Januari tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi merupakan gabungan dari kantor PDE dan salah satu bidang dari dinas Perhubungan.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

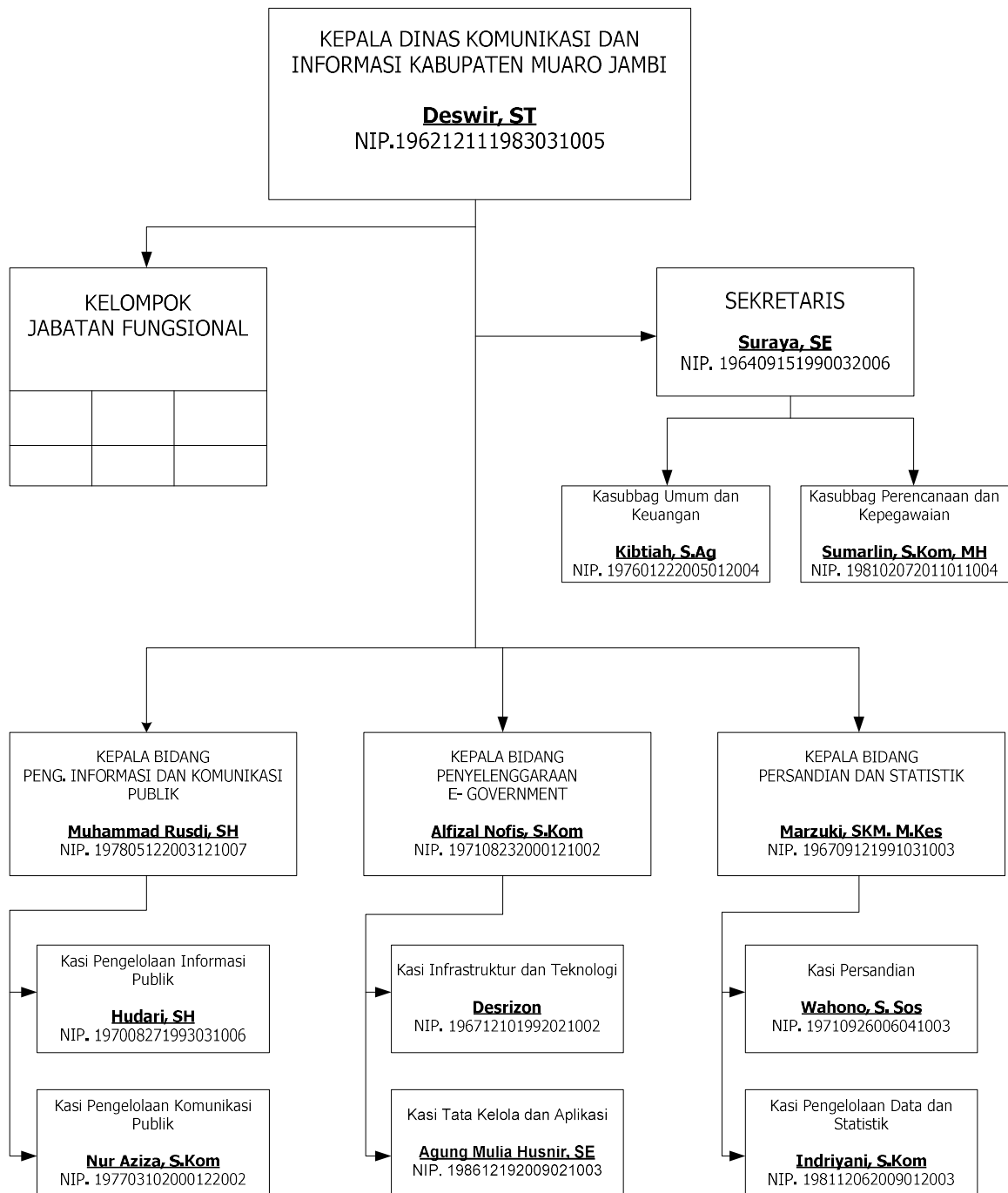
- a. Perencanaan program di Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- b. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika
- c. Penetapan rencana strategis bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- d. Pembinaan dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan
- e. Pengarahan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai ketentuan yang efektif dan efisien
- f. Pelaksanaan evaluasi secara priodik kinerja bawahan
- g. Pelaporan hasil kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika secara priodik kepada atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pengawasan pengelolaan di bidang Komunikasi dan Informatika.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari:
  - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
  - 2. Seksi Tata Kelola dan Aplikasi.
- e. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari:
  - 1. Seksi Persandian; dan
  - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**



Uraian tugas dari masing-masing perangkat organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

**a) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi terhadap urusan di Kesekretariatan, urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, urusan Penyelenggaraan E-Government, urusan Persandian dan Statistik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government;
4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b) Sekretaris**

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Umum dan Keuangan, urusan Perencanaan dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Sekretaris, terdiri dari:

1. Merencanakan program kerja kesekretariatan;
2. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Menetapkan rumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas;
4. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum;
5. Menetapkan rumusan kebijakan pengelola kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
6. Menetapkan rumusan kebijakan administrasi kepegawaian;
7. Menetapkan rumusan kebijakan pengelola keuangan; dan
8. Mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- ✓ Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- ✓ Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- ✓ Menyiapkan bahan inventarisasi, penerimaan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;
- ✓ Melaksanakan urusan pembendaharaan dan tata usaha keuangan serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan; dan
- ✓ Mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi terhadap urusan umum dan keuangan.

**b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Perencanaan dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- ✓ Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data perencanaan dan kepegawaian;
- ✓ Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian;
- ✓ Memfasilitasi pembinaan umum dan pengembangan karier pegawai;
- ✓ Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- ✓ Mengawasi terhadap urusan perencanaan dan kepegawaian.

**c) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari:

1. merencanakan program kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi publik;
3. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik;
5. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
6. mengawasi urusan bidang informasi dan komunikasi publik.

Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja kegiatan Pengelolaan Informasi Publik;
- ✓ Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan pengelolaan informasi publik;
- ✓ Menyiapkan bahan kebutuhan pembangunan sistem informasi publik;
- ✓ Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi publik;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan sistem informasi publik;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- ✓ Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi publik.



b. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.

Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- ✓ Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan pengelolaan komunikasi publik;
- ✓ Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan komunikasi publik;
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengelolaan komunikasi publik;
- ✓ Melaksanakan pelayanan komunikasi publik berupa Medsos, Email dan Call Center; dan
- ✓ Mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik.

**d) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government**

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Penyelenggaraan E-Government sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari:

1. Merencanakan program kerja bidang Penyelenggaraan E-Government;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyelenggaraan E-Government;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi, serta tata kelola e-government;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi, serta tata kelola e-government;
5. Menyusun norma, standar, prosedur di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi, serta tata kelola e-government;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi, serta tata kelola e-government; dan

7. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi, serta tata kelola e-government.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- ✓ Merumuskan kebijakan teknis standarisasi penyiaran dan media Infrastruktur dan Teknologi;
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka Infrastruktur dan Teknologi;
- ✓ Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi;
- ✓ Menyenggarakan Jaringan Sistem Infrastruktur dan Teknologi; dan
- ✓ Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi.

b. Kepala Seksi Tata Kelola dan Aplikasi.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Aplikasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan tata kelola dan Aplikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi tata kelola dan aplikasi, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja seksi tata kelola dan Aplikasi;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata kelola dan Aplikasi;
- ✓ Menyiapkan bahan pembinaan Aplikasi;
- ✓ Menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola Aplikasi;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan Tata Kelola E-Government;

- ✓ Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Tata Kelola E-Government;
- ✓ Melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi satuan kerja perangkat daerah, pelayanan publik; dan
- ✓ Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan aplikasi.

#### **e) Kepala Bidang Persandian dan Statistik**

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Persandian dan Statistik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:

1. Merencanakan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyelenggaraan E-Government;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan persandian dan statistik;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang system persandian, statistik;
5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian dan statistik; dan
6. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan di pelaksanaan layanan persandian dan statistik.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

##### **a. Seksi Persandian; dan**

Kepala Seksi Persandian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Persandian, terdiri dari :

- ✓ Merencanakan program kerja Seksi Persandian;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Persandian;
- ✓ Menyiapkan bahan pelayanan Persandian;
- ✓ Menyiapkan bahan penyediaan sarana teknologi Persandian;

- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan jasa persandian; dan
- ✓ Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan jasa persandian.

b. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Pengelolaan Data dan Statistik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, terdiri dari:

- ✓ Merencanakan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik;
- ✓ Menyiapkan bahan penyediaan data di bidang pengelolaan data dan statistik;
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- ✓ Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- ✓ Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Data dan Statistik.

#### **f) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas berdasarkan keahlian dan profesionalisme masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi pada saat ini total berjumlah sebanyak 19 orang

yang terdiri dari 12 orang Pejabat Struktural dan 7 orang Pejabat Fungsional Umum, rincian sumber daya manusia di Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Golongan dan Pendidikan pada Tahun 2017

No	Golongan	S2	S1	Sarjana Muda	SLTA	SLTP	SD	LK	PR	JML
1.	IV-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	IV-b	-	2	-	-	-	-	2	-	2
5.	IV-a	-	1	-	-	-	-	1	-	1
6.	III-d	1	4	-	-	-	-	4	1	5
7.	III-c	1	2	-	-	-	-	3	-	3
8.	III-b	-	4	-	-	-	-	2	2	4
9.	III-a	-	3	-	-	-	-	2	1	3
10.	II-d	-	-	2	-	-	-	1	1	2
11.	II-c	-	-	-	1	-	-	1	-	1
12.	II-b	-	-	-	1	-	-	-	1	1
13.	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	I-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi merupakan dari pelimpahan Aset dari kantor sebelumnya, yaitu kantor PDE dan sebagian dari Dinas Perhubungan.

#### A. Kondisi Infrastruktur Dasar untuk Pelayanan

Sarana infrastruktur Dasar untuk Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan peralatan penunjang pelayanan berupa bidang *e-government* dan bidang persandian dan pengelolaan data statistik.

##### A.1. Bidang *E-Government*

Bidang *e-Government* terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu: Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pengelolaan Aplikasi untuk Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Kabupaten Muaro Jambi. Bidang *e-Government* didukung oleh infrastruktur seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tabel Infrastruktur Dasar untuk Pelayanan pada Bidang *e-Government*

No	Nama Peralatan	Operasional	Keterangan
1	1 Unit Server	Peruntukan Server Pengelolaan Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Kab. Muaro Jambi	Lokasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muaro Jambi
2	3 Unit Pc	Untuk Komputer Aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai Negeri Kab. Muaro Jambi	Lokasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muaro Jambi
3	<i>Bandwidth</i> (Langganan Jaringan)	Peruntukan : - Pengelolaan website Resmi Pemerintah Kab. Muaro Jambi - Untuk Mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Lokasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muaro Jambi, Penyedia Jaringan

## A.2. Bidang Persandian dan Pengelolaan Data Statistik

Persandian dan pengelolaan data statistik didukung oleh infrastruktur dasar pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tabel Infrastruktur Dasar Untuk Pelayanan Bidang Persandian dan Pengelolaan Data Statistik

No	Nama Peralatan	Operasional	Keterangan
1	Laptop Fujitsu®	Operasional Persandian (Hibah Lemsaneg)	Kondisi Baik Lokasi Bagian Umum Setda Kab. Muaro Jambi
2	Kriptosoft Pro® (Dongle)	Operasional Persandian (Hibah Lemsaneg)	Kondisi Baik Lokasi Bagian Umum Setda Kab. Muaro Jambi
3	Mesin faksimile	Operasional Pesandian	Kondisi Baik Lokasi Bagian Umum Setda Kab. Muaro Jambi

## B. Sarana Pendukung Kegiatan Operasional dan Administrasi Perkantoran

Sarana pendukung kegiatan operasional dan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2017 memiliki inventaris peralatan seperti pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Tabel Sarana Pendukung Kegiatan Operasional dan Administrasi Perkantoran

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Meja Biro	5	Baik	APBD
2.	Meja ½ Biro	12	Baik	APBD
4.	Meja Rapat	2	Baik	APBD

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
5.	Meja Komputer	8	Baik	APBD
7.	Kursi Putar	22	Baik	APBD
8.	Kursi Kerja	10	Baik	APBD
10.	Kursi Tamu Stenliss	1	Baik	APBD
11.	Kursi Tamu sofa	2	Baik	APBD
12.	Filling Kabinet	14	Baik	APBD
13.	Lemari Besi	4	Baik	APBD
14.	Lemari Kaca	2	Baik	APBD
15.	Lemari Kayu	2	Baik	APBD
18.	Layar Projektor	1	Baik	APBD
19.	Komputer PC	9	Baik	APBD
20.	Laptop	10	Baik	APBD
21.	Printer Besar	3	Baik	APBD
22.	Printer	6	Baik	APBD

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi seperti dijelaskan sebelumnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk Januari tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2016. Kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan komunikasi dan informatika sehingga penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel sesuai keterbukaan era reformasi dalam upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik.

Pelayanan oleh Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi belum bisa dilaksanakan secara maksimal mengingat dinas ini masih baru sehingga masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terutama perangkat keras di bidang teknologi informasi. Meskipun baru berdiri dan dengan keterbatasan yang ada, Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi *telah berhasil melakukan pengadaan dan pengelolaan terhadap sistem Pengadaan secara elektronik dan website Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.*

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sebagai organisasi yang baru berdiri tentunya akan menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Diskominfo terkait informasi dan komunikasi di Kabupaten Muaro Jambi adalah dinamika perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks yang bergerak cepat, sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan

masyarakat terutama pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih.

Kemajuan tersebut seyogianya harus mampu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Namun, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan/kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan adaptif. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, di antaranya :

#### **2.4.1 Tantangan**

1. Persaingan Global
2. Pada tiap SKPD yang menangani komunikasi dan Informatika tidak mempunyai nomenklatur yang sama
3. Belum optimalnya penyelenggaraan *e-Government*
4. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan
5. Kurangnya komitmen Pimpinan SKPD Kabupaten Muaro Jambi terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data
6. Konten digital yang kurang mendidik dan atau merusak moral dan tatanan sosial masyarakat
7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi
8. Tingginya sengketa informasi yang terjadi
9. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi
10. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap *platform* produk TI



11. Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta pengguna alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak memiliki izin
12. Keterbatasan anggaran
13. Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional Khususnya Yang Menguasai Bidang Analis, Aplikasi, Database, Pemograman Dan Jaringan
14. Inkonsistensi Penempatan Aparatur Dengan Kompetensi Yang Dimiliki

Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti:

#### **2.4.2 Peluang**

1. Kemajuan teknologi informasi
2. Keinginan masyarakat memperoleh informasi
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemendagri, Kemkominfo dan Kemsesneg RI)
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi)
5. Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi
6. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta
7. Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik
8. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
9. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara

Selain peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi tersebut diatas, juga terdapat peluang lain dalam pengembangan pelayanan publik yaitu upaya pengembangan pelayanan dasar (minimal), sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permen kominfo RI) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota memberikan harapan baru dalam peningkatan pelayanan informasi publik.

Upaya merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung/kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi SKPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan masyarakat serta stakeholder untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Muaro Jambi merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman Muaro Jambi.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Muaro Jambi periode 2017-2022, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi.

## **2.5. Analisis RTRW Kabupaten Muaro Jambi**

### **2.5.1 Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi**

Berdasarkan telaahan terhadap struktur ruang Kabupaten terkait dengan pengembangan komunikasi dan informasi yaitu berupa perencanaan pembangunan prasarana telekomunikasi dalam bentuk sistem jaringan kabel dan nirbakel di wilayah Kabupaten

Muaro Jambi. Adapun untuk jaringan kabel meliputi pengembangan jaringan berada di Kecamatan Sekernan, Kecamatan Muaro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Mestong, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan, dan Kecamatan Taman Rajo.

Sedangkan untuk pengembangan jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS) direncanakan akan dilakukan pada wilayah Kecamatan Sakernan, Kecamatan Muaro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Mestong, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan, dan Kecamatan Taman Rajo.

### **2.5.2 Pola Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi**

Berdasarkan telaahan terhadap pola ruang Kabupaten terkait dengan pengembangan komunikasi dan informasi yang perlu di perhatikan adalah rencana terkait penetapan kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman karena membutuhkan pelayanan dan penyediaan terkait dengan Komunikasi dan Informasi.

Di Muaro Jambi hanya ada indusri kecil yang tersebar di kawasan perkotaan di Kecamatan Sekernana, Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu. Mengingat semakin terbatasnya luas lahan untuk kegiatan usaha pertanian serta perlunya peningkatan SDM masyarakat, maka kegiatan industri yang berbasis agro perlu didorong pertumbuhannya.

Oleh karena itu industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan perlu mendapat prioritas utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Agroindustri dapat dikembangkan di beberapa kecamatan yang berdekatan dengan Kota Jambi, seperti di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan dan Mestong. Kegiatan industri yang dikembangkan dapat saja berupa industri kecil sampai sedang namun tetap berupa industri ramah lingkungan dan non polutan.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Muaro Jambi ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) provinsi Jambi yang dapat sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Tabel 1.5 Nama dan Lokasi Wisata di Kabupaten Muaro Jambi

Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Jenis Wisata
1. Mestong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata</li> <li>Penangkaran Buaya</li> <li>Upacara Adat</li> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Taman pemancingan</li> <li>Perkebunan</li> <li>Pertanian Tan. Pangan</li> <li>Kehidupan Suku Anak Dalam</li> </ul>	Wisata Alam  Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya
2. Sungai Bahar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Perkebunan</li> <li>Kehidupan Suku Anak Dalam</li> </ul>	Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Budaya
3. Kumpeh Ulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Danau Arang-arang</li> <li>Sungai</li> <li>Makam Kuno (Selaras Pinang Masak, Orang Kayo Gemuk, Orang Kayo Pedataran)</li> <li>Kerajinan Desa</li> <li>Perkebunan</li> <li>Perikanan</li> <li>Peternakan</li> </ul>	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah  Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian Tan. Pangan</li> <li>Taman Wisata (Taman Hiburan ACI)</li> <li>Bumi Perkemahan Pemuda dan BBAT</li> <li>Perkebunan Buah-buahan PT BHG</li> </ul>	Wisata Agro Wisata buatan  Wisata Alam Wisata Agro
4.. Kumpeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai</li> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Perkebunan</li> <li>Perikanan</li> <li>Pertanian Tan. Pangan</li> <li>Peternakan</li> </ul>	Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro
5. Maro Sebo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolek Percandian Muaro Jambi</li> <li>Perkebunan Duku, Durian, Jeruk Bali</li> <li>Wisata Buru</li> <li>Museum</li> <li>Peninggalan Sejarah</li> <li>Upacara Adat</li> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Desa Kerajinan</li> <li>Bekarang Ikan</li> <li>Kehidupan Suku Anak Dalam</li> </ul>	Wisata Budaya/ Sejarah Wisata Agro Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya
6. Jambi Luar Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman Setiti Indah</li> <li>Sungai</li> <li>Wisata Buru</li> <li>Peninggalan Sejarah Candi Pematang Jering</li> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Taman Pemancingan</li> <li>Perkebunan</li> <li>Perikanan</li> <li>Pertanian Tan. Pangan</li> <li>Peternakan</li> <li>Upacara Adat Turun ke Sawah</li> <li>Kehidupan Suku Anak Dalam</li> </ul>	Wisata buatan Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya  Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya
7. Sekernan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai</li> <li>Wisata Buru</li> <li>Upacara Adat (Ngantar Kembang ke Kuburan)</li> <li>Seni Pertunjukan</li> <li>Perkebunan</li> <li>Pertanian Tan. Pangan</li> <li>Peternakan</li> </ul>	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya  Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro
8. Sungai Gelam		

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi

Permukiman Perkotaan; pertumbuhan kawasan perkotaan di Muaro Jambi akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan pada kawasan sekitar perbatasan dengan Kota Jambi dan sepanjang koridor Kota Jambi dan Sengeti sebagai Ibukota Kabupaten Muaro Jambi.

Secara fungsional Kota Sengeti adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya. Sedangkan permukiman sekitar perbatasan kota Jambi sebagai kawasan perkotaan hinterland dari Kota Jambi dan Kota Sengeti dengan fungsi utama kegiatan berbasis perdagangan dan jasa serta akan menjadi pusat kegiatan agro industri.

Kawasan perkotaan yang akan cenderung berkembang tersebut berada di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan dan Kumpeh Ulu. Permukiman Perdesaan; Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik.

Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis. Memperhatikan kondisi faktual lapangan pola pembangunan permukiman di Muaro Jambi umumnya membentuk pola pita (*ribbon*) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan.

Hal ini mudah dilihat, terutama dari Pudsak sampai Tanjung di Kecamatan Kumpeh, serta di sekitar Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, dan Sungai Gelam yang merupakan konsentrasi utama permukiman penduduk wilayah perdesaan di Muaro Jambi.

Pembangunan permukiman perdesaan di Muaro Jambi memang belum padat dan menimbulkan masalah. Selanjutnya pola pembangunan permukiman dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal.

### **2.5.3 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Muaro Jambi**

Kawasan strategis kabupaten yang diusulkan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah kawasan berikut :

1. Kawasan Taman Nasional Berbak
2. Koridor Sengeti – Kota Jambi
3. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Agroindustri terutama di Kecamatan Maro Sebo, Kumpeh Ulu dan Sungai Gelam
4. Kawasan Taman Wisata Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo

## **BAB 3**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan, berupa:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta bidang persandian
2. Terbatasnya anggaran yang di sediakan Pemerintah Daerah untuk Membangunan Jaringan Internet dan Aplikasi Pemerintah yang terintegasi serta penunjang memperluas akses internet disekolah dan di desa dan kecamatan
3. Belum tersedianya sarana dan prasana penunjang kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya peralatan dibidang Teknologi Informasi (server langganan jaringan yang memadai) untuk membangun jaringan internet dan aplikasi yang terintegasi guna membangun dan mengembangkan pelayanan secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
4. Belum optimalnya website resmi Pemerintah yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
5. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat
6. Masih kurangnya sosialisasi tentang manfaat teknologi informasi dimasyarakat
7. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggara penyiaran
8. Belum memadainya ruang kerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi

Ke depan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi diharapkan akan teratasi dengan memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing.

3. Mengembangkan infrastruktur jaringan dan sarana informasi dan komunikasi yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan antara Pemerintah dengan Stakeholder.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui pemanfaatan ICT.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (RPJMD 2017-2022)**

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada program Nawa Cita Point ke 2 (dua) "Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya" yang diimplementasikan dalam bentuk program Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yaitu "Mewujudkan Ketersediaan dan Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Guna Mendukung Terciptanya Fokus Pembangunan Nasional", selanjutnya dituangkan dalam Visi Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi pada tahun 2017-2022 yang hendak dicapai adalah :

**"Terwujudnya Kabupaten Muaro Jambi TUNTAS ( TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA) 2022".**

Pencapaian visi kepala daerah dalam dokumen RPJMD diatas diwujudkan dalam 5 misi:

#### **1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, berkualitas, Akuntabel, Dan Partisipatif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, Transparan, Akuntabel, berkualitas Dan Partisipatif berorientasi pada Pelayanan Publik berbasis teknologi Informasi.

#### **2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan serta kebutuhan Dasar Lainnya**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan.

#### **3. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman Dan Demokratis**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Rukun dan Harmonis, Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Masyarakat dalam

Kerangka Supremasi Hukum dan HAM dan Meningkatkan kesamaan Hak dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

#### **4. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Utilitas Lainnya Serta Perwujudan Penataan Ruang Yang Memiliki Daya Dukung Lingkungan**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Utilitas Lainnya yang berkualitas, Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas dan fasilitas Perumahan dan permukiman , Peningkatkan Upaya perwujudan Penataan Ruang dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan.

#### **5. Optimalisasi Sumberdaya Daerah Melalui Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatkan daya saing daerah**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Berdaya Saing.

#### **6. Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Misi ini bertujuan untuk Peningkatan Tarap Hidup Masyarakat berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Penyediaan Sarana Produksi Ekonomi Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut diatas penjelasan pada Misi Kedua Yaitu : "Meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" serta Misi keempat yaitu "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", maka dengan dasar ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi akan dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka dirumuskan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD sebagai berikut :





No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p><b>Point 2:</b> Meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</p> <p><b>Poin 4:</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p>			
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur.	Terbatasnya anggaran yang tersedia.	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana. 2. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya anggaran yang tersedia.	Adanya dukungan pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Terbatasnya kemampuan aparatur di bidang teknis	Terbatasnya anggaran yang tersedia.	Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5.	Program <i>e-Government</i>	Belum tersediannya Infrastruktur jaringan, maupun sarana pendukung yang memadai serta kemampuan keterampilan Sumber daya Aparatur yang belum memadai	Terbatasnya Anggaran yang tersedia	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada
6.	Program Pelayanan Informasi	Belum Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Terbatasnya Anggaran yang tersedia	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada
7	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Belum Tersedianya Infrastruktur dan sarana yang memadai	Terbatasnya Anggaran yang tersedia	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada
8	Program Sarana dan kerjasama Media Masa	Belum terkoordinir dan belum makasimalnya pengelolaan sarana serta kerja media massa dalam pengelolaan informasi	Terbatasnya Anggaran yang tersedia	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada
9	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Aplikasi dan telematika	Belum tersediannya Infrastruktur jaringan, maupun sarana pendukung yang memadai serta kemampuan keterampilan Sumber daya Aparatur yang belum memadai	Terbatasnya Anggaran yang tersedia	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada
10	Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Sektor	Masih Tumpang tindihnya kewenangan dengan instansi lain dibidang pengolahan data dan Statistik	Belum jelas nya tentang tugas dan Tanggung jawab masing-masing instansi	Kemauan pimpinan untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten/Kota**

Masyarakat Informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan merupakan prasyarat utama dan harus dimanfaatkan secara optimal bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembanguna kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

- a) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informative dalam kerangka NKRI,
- b) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ,
- c) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ,
- d) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ,
- e) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Telaah Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten/Kota terhadap Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah.	Keterbatasan kewenangan provinsi	Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan.
2.	Tersedia dan tersebar informasi yang factual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program.	Kurang koordinasi dalam penyusunan program	Adanya kesamaan fungsi dan wewenang.
3.	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal.	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data. 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat. 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah bidang komunikasi dan informatika. 4. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran.	1. Keterbatasan ketersediaan anggaran. 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika.	Adanya kesamaan fungsi dan peran.
4.	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran dan Media Cetak).	1. Keterbatasan anggaran. 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika.	Adanya kesamaan fungsi dan peran.
5.	Mendorong terciptanya SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika.	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul.	1. Keterbatasan anggaran. 2. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM unggul.
6.	Mengembangkan system komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan local.	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industry komunikasi dan informatika.	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika.
7.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika.	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestic.	Terbatasnya produk lokal	Tumbuhnya komunitas industry komunikasi dan informatika.
8.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata Internasional.	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika.	Keterbatasan kapasitas sumber daya.	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik.
9.	Meningkatnya prosentase OPD yang telah mempunyai akses ke-jaringan internet.	Keterbatasan infrastruktur.	Keterbatasan anggaran	

### 3.4. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

1. Kurangnya Infrastruktur serta sarana dan prasarana dibidang Teknologi informasi terutama Infrastruktur Jaringan yang memadai untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan pemerintah
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*) dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi
3. Website yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sekaligus media informasi dan promosi resmi pemerintah
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat serta dampak negatif dari teknologi informasi
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap keterbukaan informasi
6. Belum tersedianya pusat data (*Data Center*) secara elektronik sebagai pusat untuk akses informasi pemerintah
7. Kurangnya tenaga pengelola dan pengamanan data serta informasi
8. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau layanan Online
9. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
10. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

## **BAB 4**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Visi Dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten Muaro Jambi**

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi kearah yang ingin dicapai dan mampu menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang berorientasi masa depan serta menjamin kesinambungan kemajuan organisasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

##### **4.1.1 Visi**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi tersebut diatas didefinisikan, sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Muaro Jambi Berbasis Teknologi dan Informatika, Berbudaya, Maju dan Sejahtera”.**

- a. Masyarakat berbasis teknologi dan informatika yaitu memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat serta komunikasi sosial yang transparan dan akuntabel serta cepat berbasis teknologi informatika.
- b. Berbudaya yaitu mengembangkan potensi perilaku yang baik untuk berintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan sosial dan mampu memilih teknologi dan informatika yang layak untuk diterapkan.
- c. Maju yaitu mendorong percepatan pelaksanaan pemanfaatan Teknologi dan Informatika baik pemerintah, swasta dan masyarakat menuju **MUARO JAMBI TUNTAS 2022.**
- d. Sejahtera yaitu mampu menciptakan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis teknologi dan informatika.

##### **4.1.2 Misi**

Merealisasikan Visi dan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, dirumuskan dalam Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional di Bidang Teknologi dan Informatika
- b. Meningkatkan kerjasama dibidang komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi
- c. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel
- d. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Berdasarkan paparan misi diatas, yang dimaksud dengan :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional di Bidang Teknologi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi adalah upaya untuk Meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat muaro jambi dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal untuk di segala bidang untuk pemabangunan dan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi, khususnya peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA) pegawai negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi system administrasi pemerintah menuju terwujudnya e-Government (tata kelola pemerintah berbasis elektronik) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan menyiapkan SDA secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDA yang ada dalam bidang pengetahuan teknologi informasi untuk semua tingkat keahlian, untuk mengelola system yang berada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi maupun pengguna yang berada di Badan/Dinas/Biro/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, berupa pengadministrasian komputer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dengan mempersiapkan jaringan server utama dalam menjalankan aplikasi.
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum sekaligus mengikutsertakan serta membina lembaga-lembaga sosial masyarakat dibidang komunikasi dan informatika seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang komunikasi dan teknologi informasi di Kabupaten Muaro Jambi .
3. Meningkatkan pelayanan informasi multimedia yang terupdate kepada publik yang terprogram, Transparan dan akuntabel melalui website Pemerintah Kabupaten Muaro

Jambi [www.muarojambi.go.id](http://www.muarojambi.go.id) yang isinya terdiri dari website seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang terintegrasi dan terkelola dengan baik sebagai perwujudan penerapan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Rencana Urusan Pemerintahan (SIRUP), Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Kabupaten Muaro Jambi yang juga merupakan aktualisasi dari penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

4. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berupa jaringan kabel fiber optik guna memudahkan pengguna melakukan komunikasi dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi berupa aplikasi yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan di OPD sehingga data dapat terangkum secara terpusat pada server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dan dapat memanfaatkan fasilitas jaringan internet/intranet sebagai tulang punggung penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi dengan membangun infrastruktur teknologi informasi, selain itu juga membangun data senter sebagai pusat informasi muaro jambi dan melengkapi prasarana yang memadai dibidang teknologi informasi.

#### **4.1.3 Motto**

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

**"KOMUNIKASI DAN INFORMASI TERARAH CEPAT, AKURAT SERTA MANFAAT"**

## **4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Muaro Jambi.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi selaras dan mendukung visi dan misi Bupati Muaro Jambi untuk mewujudkan **MUARO JAMBI TUNTAS.**

### **4.2.1 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:



## **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik dengan Teknologi yang Aplikatif."**

### **4.2.1 Sasaran**

1. Menyediakan Jaringan dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika yang memadai untuk mempermudah akses internet di Lingkup Pemerintah maupun Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
2. Meningkatkan Pelayanan, cepat baik dan transparan berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Muaro Jambi.
3. Mempermudah Akses layanan Informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
4. Terwujudnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dengan membina kelompok-kelompok informasi masyarakat serta menjalin kerjasama dengan lembaga informasi dan komunikasi di Kabupaten Muaro Jambi.
5. Terlaksananya Pengamanan Informasi penting Milik Pemerintah.
6. Terwujudnya Sumber Manusia yang baik dibidang Teknologi Informasi di Kabupaten Muaro Jambi.

## **BAB 5**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) agar tercapai tujuan dan sasaran di dalamnya diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dibawah ini adalah analisis terkait strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi.

#### **4.3.1 Strategi**

1. Kekuatan – S.
  - a. Tersedianya peluang untuk mengikuti diklat teknis dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur (SDA).
  - c. Tersedianya anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja di bidang TIK.
  - d. Tersedianya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - e. Tersedianya media informasi dan teknologi untuk didayagunakan.
  - f. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kelemahan – W.
  - a. Kurangnya pemahaman aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - b. Kurangnya ketersediaan aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - c. Kurangnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kinerja aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- d. Kurangnya dukungan pimpinan terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - e. Kurangnya ketersediaan media informasi dan teknologi yang diberdayakan.
  - f. Kurangnya dukungan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peluang – O.
- a. Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik formal maupun non formal.
  - b. Adanya peluang untuk penambahan tenaga teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - c. Adanya peluang penambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja.
  - d. Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - e. Adanya ketersediaan media informasi dan teknologi untuk didayagunakan.
  - f. Adanya ketersediaan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Ancaman – T.
- a. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah dan merata.
  - b. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini.
  - c. Masih kurangnya dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - e. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan *bandwidth* untuk didayagunakan dalam menjalankan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - f. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

#### **4.3.2 Kebijakan**

Kebijakan Teknis Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

1. Pengoptimalan pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika yang memadai terutama Infrastruktur Jaringan dan server.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi
3. Peningkatan dan optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat dengan peningkatan Website Resmi pemerintah yang terintegrasi dengan semua OPD sebagai media Komunikasi dan Promosi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
5. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta mempermudah akses informasi kepada masyarakat tentang pembangunan daerah.
6. Penyebarluasan Informasi manfaat serta dampak Negatif Teknologi Informasi bagi masyarakat.
7. Optimalisasi dan peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Terkait dibidang Teknologi Informasi
8. Optimalisasi Peran serta Masyarakat dan lembaga dalam pembangunan terutama dibidang komunikasi dan informasi
9. Meningkatkan layanan yang berbasis teknologi informasi dan layanan informasi kepada masyarakat dengan membangun data senter yang baik dan memadai
10. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam menunjang tugas pemerintah.

## **BAB 6**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi yang telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi yang menyangkut Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 adalah Misi Kedua Yaitu : "Meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" serta Misi keempat yaitu "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", dan untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 ke dalam program-program pembangunan.

#### **5.1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 adalah berupa program-program sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran (Program Rutin)
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin)
4. Program E-Government (Program Operasional)
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ( Program Operasional)
6. Program Peningkatan Pelayanan Informasi (Program Operasional)
7. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik (Program Operasional)
8. Program Sarana Informasi dan Kerjasama dengan Media Masa (Program Operasional).
9. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi Aplikasi dan Telematika (Program Operasional).
10. Program Pengembangan Data Informasi /Statistik Sektor (Program Operasional)

## **5.2. Kegiatan Pokok**

Program Pembangunan untuk Urusan Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan RPJMD 2017 – 2022, maka kegiatan pokok dari masing-masing program pada Dinas Informasi dan Komunikasi dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Program E-Government (Program Operasional) dengan Kegiatan Pokok.**

- a. Program Pengelolaan E-Government
- b. Pengelolaan Internet dan Intranet Pemerintah Daerah
- c. Peyediaan infrastruktur dan Jaringan Teknologi dan Informasi
- d. Pengelolaan Aplikasi Informatika
- e. Layanan Infrastruktur Dasar data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
- f. Monitoring, Pemeliharaan, dan Evaluasi Infrastruktur Telematika
- g. Master Plan Pengelolaan TIK E-Government
- h. Pengamanan Informasi
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- j. Penyelenggaraan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- k. Pengelolaan Situs Resmi Pemda

### **2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Kegiatan Pelayanan Sistem Informasi Gaji Pegawai.
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Pengelolaan Gaji Pegawai Kabupaten Muaro Jambi

### **1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

- a. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
- b. Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
- d. Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Informasi Publik

### **2. Program Peningkatan Akses dan Kualitas (Program Operasional) dengan kegiatan Pokok.**

- a. Program Pelayanan Administari Perkantoran
- b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- h. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tujuan / Sasaran
- k. Penyediaan Makan dan Minum
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- n. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- p. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- q. Pembangunan Gedung Kantor
- r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- s. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**3. Program Sarana Informasi dan Kerjasama dengan Media Massa (Program Operasional)**

- a. Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media dan Komunitas
- b. Program sarana informasi dan kerjasama dengan Media Massa.
- c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa

**4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi (Program Operasional) dengan kegiatan Pokok.**

- a. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Aplikasi dan Telematika
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi
- c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah Kab/Kota

**5. Program Pengembangan Data Informasi /Statistik Sektor (Program Operasional) dengan kegiatan Pokok.**

- a. Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Sektor
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Statistik
- c. Penyelenggaraan Kompilasi Produk Administrasi

## **BAB 7**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi menjadi dasar dan merupakan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi antar Bidang dan Sekretariat Badan. Rencana Strategis ini dirinci lebih lanjut dalam Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dan secara aplikatif akan tertuang dalam Program Kerja/Kegiatan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya. Rancangan Rencana Strategis ini juga telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 – 2022.

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur utama dan terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, karena itu program kegiatan yang direncanakan diarahkan membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 – 2022 merupakan salah satu upaya pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional dan agenda prioritas pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### **Indikator Kinerja**

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Muaro Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu OPD pendukung terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan.





**TABEL 1.8 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPPRD Tahun ( Juta Rupiah )						Realisasi Pendapatan Daerah Tahun ( Juta Rupiah )					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	—
1	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	---	1. Persentase Realisasi Pajak Daerah.	• Penggalan dan Peningkatan Sumber-sumber Pajak Daerah	30.081	33.728	37.818	42.404	47.546	53.311	15.787	21.577	23.175	23.057	28.253	—
			2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah.	• Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel	13.282	14.979	16.891	19.049	21.481	24.225	5.955	7.607	12.423	11.621	11.689	—
			3. Persentase Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		5.372	5.714	6.077	6.464	6.875	7.313	2.924	2.567	2.719	3.623	3.656	—
			4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		17.932	19.130	20.407	21.769	23.223	24.773	11.913	16.778	19.006	24.822	17.790	—

Sumber : RPJMD Kab. Muaro Jambi 2017-2022 , 2017

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Muaro Jambi dengan jelas, terarah dan tepat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi setiap tahun berjalan dengan berorientasi pada hasil yang diinginkan dari tahun 2017-2022 sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Renstra ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**SKA TIM PENYUSUN**

**BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RENSTRA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUARO JAMBI PERIODE 2017-2022**

Pada hari ini    tanggal    bulan    Tahun    Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan  
di bawah ini :